

**PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**

**(Studi Implementasi Kebijakan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Blitar
berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil)**

TESIS

Program Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik



Oleh :
ISKANDAR RAHMAN DINATA
19072000026

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**

**(Studi Implementasi Kebijakan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Blitar
berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil)**

Oleh :

ISKANDAR RAHMAN DINATA

NIM : 19072000006

Pembimbing I


(PROF. Dr. Drs. BONAVENTURA NGARAWULA, MS)

Pembimbing II


(Dr. DWI SUHARNOKO, M.Si)

PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

(Studi Implementasi Kebijakan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Iskandar Rahman Dinata
19072000026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

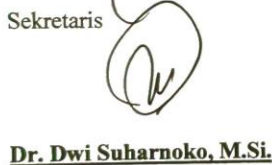
Susunan Dewan Penguji

Ketua



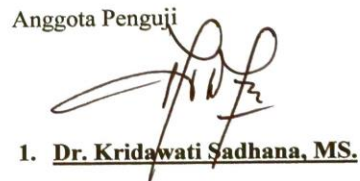
Prof. Dr. Drs. Bonaventura Ngarawula MS.

Sekretaris



Dr. Dwi Suharnoko, M.Si.

Anggota Penguji



1. Dr. Kridawati Sadhana, MS.



2. Dr. Roos Widajani, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister

Tanggal :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang,



Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang,

Nama : ISKANDAR RAHMAN DINATA

NIM : 19072000026

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar (Studi Implementasi Kebijakan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)”

Adalah benar-benar hasil karya asli dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari ternyata hal ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan membatalkan gelar magister yang telah diperoleh.

Blitar, 21 Desember 2023
Yang Menyatakan,


ISKANDAR RAHMAN DINATA
NIM : 19072000026

Catatan:

Surat pernyataan ini dibuat rangkap 2(dua) bermaterai
Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Kode Etik PNS di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Blitar

ISKANDAR RAHMAN DINATA. 2022

PROF. Dr. Drs. BONAVENTURA NGARAWULA, MS

Dr. DWI SUHARNOKO, M.Si

ABSTRAK

Kode etik menjadi pedoman bagi PNS agar tetap profesional. Setiap PNS yang profesional sebagai abdi Masyarakat akan selalu berpegang pada kode etik PNS dan juga Panca Prasetya Korpri. Sebab kode etik PNS ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Karena dengan itu penampilan PNS akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Masih ada pelanggaran disiplin dan juga etika, contohnya seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan, Kedapatan mencuri Selain itu juga ada PNS yang memiliki hubungan spesial dengan PNS lain, padahal PNS sebagai suri tauladan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kode etik PNS di Sekretariat Daerah Kota Blitar, terlebih ketika diterbitkannya peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode etik PNS.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Blitar , yang menjadi subjek adalah Para pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dan informannya adalah Pejabat dari eselon 2, 3 ,4 dan juga staf. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kode etik PNS di Sekretariat Daerah 1) Pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai abdi masyarakat, anggota masyarakat, dan warga Negara. Etika profesi seorang PNS melahirkan suatu kode etik yang menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku 2) Pelaksanaanya menggunakan Kode Etik PNS Indonesia yang meliputi hubungan PNS beragama, bernegara, bermasyarakat , etika dengan diri sendiri dan etika sesama PNS 3) Pelaksanan sesuai dengan perwali belum bisa berjalan maksimal karena beberapa masalah dihadapi seperti, perangkat yang belum terbentuk dan juga minim sosialisasi 4) PNS masih belum sepenuhnya sadar dan bisa membedakan antara pelanggaran etik dengan pelanggaran disiplin 5) dilingkungan secretariat sendiri masih belum dijumpai pelanggaran berarti karena koordinasidan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf yang bisa membuat kemistri yang baik

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kode Etik PNS, PNS

Implementation of Code Ethics PNS In Secretariat Daerah Major Of Blitar

ABSTRACT

Code ethics become a guidelines for PNS to keep them professional. Every PNS professional as a man of the community will always hold on to the PNS code of ethics and also Prasetya Panca KORPRI. Because the code of ethics of civil servants as one feature that must exist in the profession itself. Because with it the appearance of PNS will be properly purposeful, even continues to grow well. There are still violations of the discipline and also ethics, for example such as not to enter the workplace without description, get caught stealing in addition there is also PNS which has special relations, whereas other PNS has to be minimal model for society. The purpose of this research is to know how the implementation of the code of ethics conduct at the secretariat of Blitar City, especially when the issue of the regulation of the Blitar city's Mayor number 8 year 2017 of the code of ethics of civil servants.

The research was conducted using qualitative descriptive method. Research carried out at the Secretariat of the regional city of Blitar, which is a subject of The civil servants at the Regional Secretariat of the environment city of Blitar and the informan are officials from Echelon 2, 3, 4 and also the staff. The collection of data using interviews, observation, and documentation. Validity of the data using the technique of triangulation of sources and methods. Analysis techniques were used, namely data collection, data reduction, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.

The results From research obtained that the implementation of the code of ethics at Secretariat at of Blitar city Government. 1) attitude and behavior Guidelines in carrying out the duties of the profession as a man of the people, community members, and citizens. The ethics of the profession of a civil servants gave birth to a code of ethics that describes the professional values of a profession that is translated into standards of ethics 2) the implemntation of using a code of ethics that encompasses Indonesia PNS to religion, State, society, ethics with yourself and the ethics of felloew employe 3) the implementation according to Blitar city Major regulation can not run at maximum because some of the problems faced by such a device, which has not been formed and also the minimal socialization 4) PNS still not fully aware and can distinguish between violations of ethics with offense of disciplines 5) secretariat's own surroundings has still not found an offense means due to good communication and coordination between the leader and staff can make a good chemistry

Keywords: *Implementation, Ethics code of civil servant, PNS*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan akhir Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar (Studi Implementasi Kebijakan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)” telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Ada banyak rintangan dan hambatan yang penulis rasakan selama menyusun penulisan tesis ini. Namun berkat bantuan dari banyak pihak, tesis ini bisa berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, terutama orang tua penulis, istri, dan anak yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan kuliah dari awal hingga akhir.
2. Prof.Dr.Drs. Bonaventura Ngarawula MS. dan Dr. Dwi Suharnoko, M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam menyusun tesis sampai tahap akhir.
3. Perangkat di Lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi Bapak Asisten, Kabag-kabag dan juga Kepala Dinas terkait selaku narasumber yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
4. Serta pihak-pihak lain yang banyak membantu dalam penyusunan tesis ini, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. Penulis berharap semoga laporan tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Teoritis	15
1. Kebijakan Publik	15
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
b. Implementasi Kebijakan	17
2. Etika	24
3. Etika Birokrasi	24
4. Etika Kerja Pegawai	25
5. Kode Etik	27
6. Kode etik Pegawai negeri sipil	28
7. Sekretariat Daerah	30

8. Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2017 tentang kode Etik PNS	31
B. Pembahasan penelitian yang relevan	38
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis Sumber data	47
E. Instrumen Penelitian	49
F. Informan	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Teknik Analisis Data	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum dan lokasi penelitian.....	58
1. Gambaran umum	58
2. Kronologi Berdirinya kota Blitar.....	60
3. Logo Pemerintah Kota Blitar.....	61
B. Penyajian Data	63
1. SOTK organisasi	65
2. Sekretariat Daerah Kota Blitar.....	66
C. Analisis Hasil Penelitian.....	107
1. Hasil analisis focus penelitian Mekanisme Pelaksanaan Kode etik PNS.....	107
2. Hasil analisis focus penelitian Prosedur Implementasi Kode etik.....	109
3. Hasil analisis focus penelitian Sistem Komunikasi	

Antar Implementor	111
4. Hasil analisis focus penelitian Sistem koordinasi dalam Peraturan perundangan	113
5. Hasil analisis focus penelitian Sikap pelaksana kode etik.....	114
6. Factor Penghambat dan Pendukung	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
1. Kesimpulan	118
2. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. Faktor-Faktor Keberhasilan implementasi menurut George Edward III.....	21
2 Kerangka Konseptual.....	39
3. Analisis data Kualitatif menurut Miles dan Huberman	53
4. Kantor Walikota Blitar.....	54
5. Pintu Masuk gerbang Kota Blitar.....	55
6. Logo Pemerintah Kota Blitar	58
7. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	61
8. Wawancara dengan Pak Bero Pegawai Organisasi.....	70
9. Wawancara Pegawai Bagian Umum, Munir.....	71
10. Wawancara dengan Kabag Umum.....	73
11. Wawancara dengan Kabag Kesra	75
12. Wawancara dengan Kepala BKPSDM	79
13. Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum.....	84
14. Wawancara Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.....	94
15. Wawancara bersama Kabag Pemerintahan	99
16. Para pegawai melakukan absensi finger print.....	102
17. PNS yang dating terlambat diluar pagar Kantor Walikota.....	103
18. Suasana Apel Pagi gabungan	108
19. Aplikasi E-kinerja Kota Blitar	110

DAFTAR TABEL

1. Data Pelanggaran BKN	11
2. Hasil Penelitian Terdahulu	37
3 Pegawai di Bagian Pemerintahan	62
4 Pegawai Eselon II di Sekretariat Daerah.....	63
5. Pegawai Bagian Umum.....	63
6. Pegawai Bagian Hukum.....	66
7. Pegawai Bagian Perekonomian dan Kesra	67
8. Pegawai Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	68
9. Pegawai Bagian Organisasi	69